

TINJAUAN KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN KURIKULUM PEMBELAJARAN MENDALAM: IMPLIKASI BAGI PENGELOLAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Ira Rusdiana¹

¹Universitas PTIQ Jakarta

irarusdiana25@gmail.com

ABSTRACT; *The shift in national education policy from the Merdeka Curriculum to a deep learning approach reflects Indonesia's response to 21st-century global demands, which emphasize critical thinking, conceptual understanding, and contextual application of knowledge. This policy change has significant implications for the management of educational institutions, particularly Islamic educational institutions such as madrasahs and pesantren. This paper critically examines the deep learning curriculum policy and analyzes its implications for the management of Islamic educational institutions. Employing a qualitative descriptive method with literature review techniques, policy analysis, and Islamic education management theory, the study finds that while the principles of deep learning are generally compatible with the core values of Islamic education, implementation challenges persist. These include limited human resources, a lack of conceptual understanding among practitioners, and institutional unpreparedness. Therefore, integrative curriculum management strategies, intensive training for teachers and school leaders, and regulatory support from the government are required to ensure effective implementation of the deep learning curriculum in the context of Islamic education.*

Keywords: *Curriculum Policy, Deep Learning, Islamic Education, Education Management, Madrasah, Curriculum Implementation.*

ABSTRAK; Perubahan kebijakan pendidikan nasional dari Kurikulum Merdeka menuju pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) merupakan respons terhadap tuntutan global abad ke-21 yang menekankan kemampuan berpikir kritis, pemahaman konseptual, dan penerapan pengetahuan secara kontekstual. Kebijakan ini membawa implikasi signifikan terhadap pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren. Makalah ini bertujuan untuk meninjau secara kritis kebijakan kurikulum pembelajaran mendalam dan menganalisis dampaknya terhadap pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka, analisis kebijakan, dan kajian teori manajemen pendidikan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip pembelajaran mendalam memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar pendidikan Islam, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya

pemahaman konseptual di tingkat pelaksana, serta belum optimalnya kesiapan kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan manajemen kurikulum yang integratif, pelatihan intensif bagi guru dan kepala madrasah, serta dukungan regulasi dari pemerintah untuk memastikan keberhasilan implementasi kurikulum ini dalam konteks pendidikan Islam.

Kata Kunci: Kebijakan Kurikulum, Pembelajaran Mendalam, Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan, Madrasah, Pengelolaan Kurikulum.

PENDAHULUAN

Kurikulum merupakan cerminan dari arah dan tujuan suatu sistem pendidikan. Perubahan kebijakan kurikulum nasional bukan sekadar teknis administratif, melainkan merupakan bagian dari strategi transformasi pendidikan yang kompleks dan multidimensional. Saat ini, Indonesia tengah memasuki fase perubahan kebijakan kurikulum yang signifikan, dari Kurikulum Merdeka menuju pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*), yang menekankan pada proses berpikir tingkat tinggi, integrasi pengetahuan, dan pembelajaran yang lebih reflektif dan transformative¹.

Pendekatan pembelajaran mendalam bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memahami konsep secara menyeluruh, mengaitkan informasi lintas disiplin, serta menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks nyata. Pembelajaran tidak lagi difokuskan pada penguasaan konten semata, melainkan pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif (*4C Skills*). Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akademik, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk profil pelajar yang adaptif dan berkarakter kuat dalam menghadapi tantangan abad ke-21.²

Namun demikian, perubahan arah kebijakan ini menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar, terutama terkait kesiapan satuan pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Madrasah, pesantren, dan sekolah Islam terpadu merupakan entitas pendidikan yang memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus, baik dari segi tujuan, pendekatan pembelajaran, maupun nilai-nilai yang diinternalisasikan. Ketika kebijakan kurikulum

¹Marzuki, M., & Andayani, T. (2023). *Kurikulum Pembelajaran Mendalam sebagai Strategi Transformasi Pendidikan Abad 21*. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 8(2), 145–157.

²Putra, A. R., & Sari, D. N. (2023). *Implementasi Pendekatan Deep Learning dalam Pembelajaran Sekolah Menengah: Peluang dan Tantangan*. *Jurnal Inovasi Pendidikan Indonesia*, 12(1), 75–85

nasional bertransformasi, lembaga-lembaga ini dituntut untuk melakukan penyesuaian yang tidak selalu mudah, terutama dalam aspek manajerial, sumber daya manusia, dan dukungan sarana prasarana.

Salah satu tantangan utama yang muncul adalah rendahnya pemahaman praktis dan konseptual dari para pendidik—khususnya guru dan kepala madrasah/pesantren—terhadap konsep, prinsip, dan implementasi pembelajaran mendalam. Kurangnya pelatihan dan pendampingan kurikulum yang memadai berpotensi menghambat efektivitas implementasi dan pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Hal ini diperparah oleh minimnya kajian akademik yang secara eksplisit mengkaji relevansi pendekatan *deep learning* dengan kerangka epistemologi dan nilai-nilai khas pendidikan Islam, seperti integrasi antara ilmu dunia dan ukhrawi, serta pendekatan spiritual dalam proses belajar.

Selain itu, banyak lembaga pendidikan Islam yang masih menghadapi persoalan klasik seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendidik berkualifikasi tinggi, dan lemahnya sistem evaluasi internal. Dalam kondisi seperti ini, penerapan kurikulum baru yang kompleks dan menuntut keterampilan manajerial tinggi menjadi tantangan tersendiri. Ketimpangan antara sekolah umum dan lembaga pendidikan Islam dalam hal sumber daya juga dapat memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan, jika tidak ditangani secara bijak dalam perumusan kebijakan lanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah tinjauan kritis terhadap kebijakan kurikulum pembelajaran mendalam, dengan fokus khusus pada bagaimana kebijakan ini berdampak terhadap pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Analisis ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi kurikulum baru tidak hanya berorientasi pada perubahan format, tetapi benar-benar membawa transformasi substansial yang selaras dengan misi pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Fokus utama penelitian adalah menganalisis secara kritis kebijakan kurikulum pembelajaran mendalam dan dampaknya terhadap pengelolaan lembaga pendidikan Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan. Sumber data diambil dari portal resmi seperti Garuda, Sinta, dan ejournal perguruan tinggi Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kurikulum dan Kebijakan Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (Daryanto, 2014: 14)

Kurikulum adalah seperangkat atau suatu system rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dalam pendidikan. Sifat kurikulum adalah dinamis, kurikulum selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat kecerdasan peserta didik, kultur, system nilai, serta kebutuhan masyarakat

Kebijakan kurikulum merujuk pada keputusan strategis pemerintah dalam menetapkan arah, struktur, dan isi pendidikan nasional. Kebijakan ini bersifat dinamis dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan zaman, kompetensi global, serta konteks lokal peserta didik. Sebagai contoh, transisi dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka menunjukkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik.³

Untuk kepala sekolah, fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan kepala sekolah juga indikator keberhasilan pembelajaran.

Bagi guru, fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran pada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran juga materi yang harus diberikan pada anak didik.

Untuk siswa, fungsi³ kurikulum untuk siswa adalah sebagian acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga dipahami. Sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik.

Pengertian dan Prinsip Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)

Pembelajaran mendalam (*deep learning*) adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pemahaman konseptual, berpikir kritis, dan penerapan pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Pendekatan ini berbeda dari pembelajaran dangkal (*surface learning*) yang hanya fokus pada hafalan atau pemenuhan tugas akademik.

Dalam pustaka, ditemukan dua konsep tentang Pembelajaran Mendalam. Pertama, Pembelajaran Mendalam merujuk pada pembelajaran mesin yang telah dikembangkan melalui riset sejak tahun 1940 dari tahap awal sibernetika sampai dengan kecerdasan buatan (Peters, 2018) dan jejaring syaraf pada otak.⁴

Konsep kedua adalah pembelajaran mendalam yang diterapkan di Norwegia dalam bidang pendidikan, yang berbeda dari konsep yang dikaitkan dalam ilmu komputer (Bråten & Skeie, 2020). Penerapan Pembelajaran Mendalam dalam pendidikan dibagi menjadi tiga fase. Pada fase pertama pada tahun 1970-an istilah Pembelajaran Mendalam dikaitkan dengan teori Pembelajaran Mendalam dan teori pembelajaran dangkal (Marton & Säljö, 1976).

Dalam fase ini ditemukan bahwa pengembangan kemampuan membaca teks dengan Pembelajaran Mendalam (memahami makna, menghubungkan ide, dan melihat pada konteks yang lebih luas) lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran dangkal (menghafal fakta yang tersurat dalam teks tanpa pemahaman mendalam baik secara konseptual maupun kontekstual) untuk pembelajaran jangka panjang dan pemecahan masalah.

Pada fase kedua pada tahun 1990-2000-an pemikiran bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan, yang dipengaruhi oleh teori konstruktivis Jean Piaget dan Lev Vygotsky, memperkuat gagasan tentang Pembelajaran Mendalam. Fase ini mempopulerkan metode pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, dan berbasis masalah. Dengan kebutuhan

³ Yulia Rahayu. "Problematika Kurikulum Di Sekolah Dasar". Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Vol: 08 Nomor 01, Juni 2023.

untuk menguasai Keterampilan Abad ke-21 dan memanfaatkan teknologi, Pembelajaran Mendalam mulai dikaitkan dengan pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Semua ini juga telah diterapkan di Indonesia tetapi proses dan hasilnya masih jauh dari harapan. Pada fase akhir dalam era modern 2010 hingga saat ini dilakukan integrasi teknologi, teknologi pendidikan untuk mendukung Pembelajaran Mendalam dengan menggunakan simulasi, pembelajaran berbasis permainan, dan pembelajaran berbasis data. Paling mutakhir, Pembelajaran Mendalam mencakup isu-isu global, seperti keberlanjutan, literasi digital, dan pembelajaran sosial emosional. Singkat kata, penerapan Pembelajaran Mendalam pada konteks pendidikan lebih menekankan pada pemahaman mendalam oleh peserta didik dalam mengaplikasi pengetahuan dalam berbagai cita-cita konteks.⁵

Prinsip utama pembelajaran mendalam mencakup konstruksi makna, keterkaitan antarmateri, refleksi, partisipasi aktif, dan transfer pengetahuan. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk membangun pemahaman yang mendalam melalui keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran.

Landasan Filosofis dan Pedagogis Kurikulum Pembelajaran Mendalam

Filosofi pendidikan memiliki peran fundamental dalam membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan manusia secara utuh. Filosofi ini menjadi landasan yang mengarahkan tujuan dan proses pendidikan agar senantiasa relevan dengan konteks sosial, budaya, dan tantangan zaman. Sebagaimana ditegaskan oleh John Dewey, pendidikan bukanlah sekadar persiapan untuk hidup di masa mendatang, namun juga merupakan kehidupan itu sendiri. Hal ini berarti pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu, tetapi juga alat untuk membangun masyarakat ideal yang mencerminkan nilai-nilai universal seperti kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan, dengan mengintegrasikannya ke dalam pengalaman hidup peserta didik.

Para filsuf ternama seperti Dewey, Ausubel, Ornstein & Hunkins, hingga Ralph Tyler, menekankan pentingnya filosofi pendidikan dalam menciptakan sistem yang visioner dan

⁴ Gillon et al., 2019; Richards et al., 2019.

⁵ Suyanto, Dkk, *Nasmik: Pembelajaran Mendalam, menuju Pendidikan bermutu untuk Semua*". Kemendikdasmen. 2025

dinamis. Filosofi ini merefleksikan cita-cita manusia dalam membangun masyarakat inklusif dan progresif. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang memungkinkan manusia terus berkembang seiring perubahan zaman.

Pendidikan yang ideal tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memerdekakan, membentuk karakter, dan memberdayakan manusia untuk berkontribusi positif kepada masyarakat. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pendidikan harus berorientasi pada kemandirian peserta didik, didukung oleh sistem among yang mencakup nilai asah, asih, asuh. Dalam pandangannya, pendidikan harus berakar pada budaya bangsa, berfungsi sebagai pranata sosial yang melestarikan dan mengembangkan kebudayaan, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sebagaimana tercermin dalam konsep “Taman Siswa.” Filosofi ini sejalan dengan pemikiran K.H. Ahmad Dahlan, yang melihat pendidikan sebagai alat perubahan sosial. Baginya, pendidikan bukan hanya transfer ilmu, melainkan proses pembentukan manusia berintegritas yang berperan aktif dalam menciptakan masyarakat berkembang dengan prinsip berbuat untuk kebaikan bersama tanpa memeralat orang lain. Selanjutnya KH. Ahmad Dahlan menekankan tujuh prinsip filosofis yang perlu menjadi landasan dalam proses pendidikan, yaitu (1) berasaskan pada tujuan hidup; (2) tidak sombong, tidak takabur; (3) kegigihan belajar untuk ketuntasan kinerja; (4) mengoptimalkan penggunaan akal untuk menemukan kebenaran sejati; (5) berani menegakkan kebenaran; (6) berbuat untuk kebaikan sesama, bukan untuk memeralat mereka; dan (7) pengamalan ilmu agama dengan tingkat kualitas tinggi untuk kemanfaatan bersama (Hajid, 2005).

Dengan demikian KH. Ahmad Dahlan juga menegaskan pentingnya pendidikan sebagai alat perubahan sosial dan pendidikan harus melahirkan manusia yang berperan aktif untuk mewujudkan masyarakat berkembang. Lebih jauh, pendidikan harus mampu menjawab kebutuhan kolektif dan individu dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, intelektual, dan sosial secara holistik. K.H. Hasyim Asy’ari menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan sejahtera melalui pendekatan yang inklusif, bermutu, dan relevan. Nilai-nilai mabadi khaira ummah seperti integritas, etos kerja, dan keadilan menjadi landasan penting dalam pembelajaran yang moderat dan adaptif. Pandangan ini bersinergi dengan gagasan Ki Bagus Hadikusumo, yang

percaya bahwa pendidikan harus mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti kemampuan melakukan analisis dan sintesis, sehingga peserta didik mampu memahami dan menghadapi tantangan yang kompleks.

Secara filosofis, pendekatan pembelajaran mendalam sejalan dengan konstruktivisme, yang meyakini bahwa peserta didik membangun pengetahuannya melalui pengalaman.

Secara pedagogis, pendekatan ini berakar pada pendidikan humanistik dan holistik, menekankan keutuhan individu sebagai pelajar yang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam masyarakat. Kurikulum ini mendorong pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan transformatif.

Prinsip Pembelajaran Mendalam

Pembelajaran Mendalam selalu dikaitkan dengan pemahaman dan aplikasi pengetahuan dalam berbagai konteks. Terkait dengan hal ini, seperti telah disebut sebelumnya, PM menerapkan prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Masing-masing berkontribusi dalam memberikan pengalaman belajar yang komprehensif dan mendalam.

a. Berkesadaran (Mindful)

Prinsip berkesadaran telah diperkenalkan oleh Ellen Langer pada tahun 1997. Pembelajaran tidak hanya melibatkan pemahaman informasi, tetapi juga bagaimana individu terlibat sepenuhnya secara mental dan fisik dalam proses pembelajaran, membuka diri terhadap pengalaman baru, dan berpikir dengan cara yang lebih terbuka dan fleksibel. Prinsip berkesadaran ini relevan dengan PM sebagai pemikiran yang berkelanjutan sebagai pendekatan holistik untuk mengaitkan konten pembelajaran dengan intelektual, emosi dan nilai-nilai (Hermes & Rimanoczy, 2018). Pembelajaran mendalam memberikan peluang Landasan Pemikiran keterlibatan peserta didik secara aktif, menstimulasi refleksi dalam pembelajaran, dan aplikasi pengetahuan yang lebih global (Fullan et al., 2018). Hal ini selaras dengan prinsip berkesadaran dalam melibatkan peserta didik baik sebagai individu ataupun anggota masyarakat. Pembelajaran yang berkesadaran merupakan pelibatan peserta didik secara menyeluruh dalam proses pembelajaran, meningkatkan kesadaran berpikir, perasaan, dan lingkungan sekitarnya. Bentz (1992) menyampaikan bahwa PM menstimulasi proses emosional, intelektual, mental, fisik, sosial dan personal peserta didik.

b. Bermakna (Meaningful)

Pembelajaran bermakna telah diperkenalkan oleh David Ausubel pada tahun 1963. Pembelajaran bermakna akan lebih efektif jika informasi baru yang dipelajari dapat dikaitkan dengan pengetahuan atau pengalaman yang sebelumnya sudah dimiliki oleh siswa. Prinsip ini relevan dengan PM sebagai cara untuk memahami makna, sehingga meningkatkan efisiensi dan retensi jangka panjang (Kovač et al., 2023). Pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat mengaitkan informasi baru dengan pengetahuannya yang akhirnya membentuk pemahaman yang mendalam pada sebuah konsep. Fullan et al. (2018) mengaitkan pembelajaran dengan pembelajaran bermakna pada konteks relevansi aktivitas pembelajaran dengan dunia nyata, mengaitkan kontribusi pengetahuan peserta didik pada berbagai konteks (lokal, nasional, regional, dan global), dan pemanfaatan lingkungan sekitar untuk pembelajaran. Pembelajaran Mendalam memiliki prinsip pembelajaran bermakna karena mengutamakan pemahaman materi secara menyeluruh, tidak sekedar menghafal. Ketika peserta didik terlibat dalam pembelajaran bermakna, peserta didik akan aktif untuk membuat keterkaitan, menganalisis, dan sintesis informasi yang merupakan prinsip PM.

c. Menggembirakan (Joyful)

Ahli-ahli pendidikan seperti John Dewey (1936) dan Howard Gardner (1983) menekankan bahwa pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata individu dan mengutamakan pembelajaran yang aktif serta pengalaman langsung baik secara emosional maupun intelektual. Michael Fullan dalam berbagai tulisannya (2014 dan 2018) tentang Pembelajaran Mendalam menyatakan pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan menggembirakan, sehingga peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran Mendalam akan bermakna untuk individu dalam meningkatkan motivasi dan menyenangkan (Kovač et al., 2023). Pembelajaran yang menggembirakan fokus pada emosi yang positif yang berhubungan dengan proses pembelajaran termasuk rasa ingin tahu, semangat, dan motivasi. Pembelajaran Mendalam mempercepat rasa nyaman karena memberikan tantangan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide kompleks. Ketika peserta didik mengalami belajar yang interaktif, aktif, serta terpusat pada peserta didik, mereka akan termotivasi untuk memahami secara mendalam materi pembelajaran, meningkatkan retensi dan

pemahaman. Dalam konteks Indonesia, PM didefinisikan sebagai pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga secara holistik dan terpadu. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk belajar secara sadar dan penuh perhatian, menikmati proses pembelajaran dengan antusias dan semangat serta menemukan makna dan relevansi dari apa yang dipelajari terhadap kehidupan mereka. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk terlibat aktif, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya, dan membangun pemahaman yang berdampak jangka panjang.

Dimensi Profil Lulusan

Pembelajaran Mendalam di Indonesia menghasilkan delapan dimensi profil lulusan peserta didik, sebagai berikut:

1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME

Dimensi profil lulusan Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME menunjukkan individu yang memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nilai keimanan ini tercermin dalam perilaku yang berakhlak mulia, penuh kasih, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian, profil ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pengetahuan, moralitas, Dan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya.

2. Kewargaan

Dimensi profil lulusan kewargaan menunjukkan individu yang memiliki rasa cinta tanah air, menaati aturan dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat, memiliki kepedulian, tanggungjawab sosial, serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Fokus kewargaan yaitu kesadaran peserta didik untuk berkontribusi terhadap kebaikan bersama sebagai warga negara dan warga dunia. Profil lulusan ini tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan individu yang memiliki karakter, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila.

3. Penalaran Kritis

Dimensi profil lulusan penalaran kritis menunjukkan individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi. Peserta didik memiliki keterampilan untuk menganalisis masalah, mengevaluasi argumen, menghubungkan gagasan yang relevan, dan merefleksikan proses berpikir dalam pengambilan keputusan. Peserta didik yang memiliki kemampuan penalaran kritis cenderung mampu memecahkan masalah secara sistematis, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan menghasilkan solusi yang rasional serta berbasis bukti. Kemampuan ini membentuk pribadi yang cermat, tanggap, dan mampu menghadapi tantangan dengan pemikiran yang mendalam dan terstruktur.

4. Kreativitas

Dimensi profil lulusan kreativitas adalah individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Mereka dapat melihat masalah dari berbagai sudut pandang, menghasilkan banyak gagasan, serta menemukan dan mengembangkan alternatif solusi yang efektif. Peserta didik yang memiliki kreativitas cenderung berpikir di luar kebiasaan, mengembangkan ide-ide secara mendalam, serta memodifikasi atau menciptakan sesuatu yang orisinal, bermakna, dan memiliki dampak positif bagi lingkungan sekitar.

5. Kolaborasi

Dimensi profil lulusan kolaborasi adalah individu yang mampu bekerja sama secara efektif dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Mereka menjalin hubungan yang kuat, menghargai kontribusi setiap anggota tim, serta menunjukkan sikap saling menghormati meskipun terdapat perbedaan pendapat atau latar belakang. Peserta didik dengan kemampuan kolaborasi mampu berkontribusi secara aktif, menggunakan pemecahan masalah bersama, dan menciptakan suasana yang harmonis untuk mencapai tujuan bersama.

6. Kemandirian

Dimensi profil kemandirian artinya peserta didik mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada

orang lain. Mereka memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan, menguasai dirinya, serta gigih dalam berusaha untuk mencapai tujuan. Peserta didik yang mandiri mampu mengelola waktu, sumber daya, dan tindakan mereka secara efektif untuk mencapai hasil yang optimal. Profil dimensi kemandirian ini menunjukkan peserta didik sebagai manusia pembelajar, yaitu individu yang secara terus-menerus mencari ilmu, mengembangkan diri, dan beradaptasi dengan perubahan (pembelajar sepanjang hayat).

7. Kesehatan

Dimensi profil kesehatan menggambarkan peserta didik yang sehat jasmani sebagai individu yang menjalankan kebiasaan hidup sehat, memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin (well-being). Profil ini menggambarkan peserta didik yang mampu menjalani kehidupan produktif dengan kualitas kesehatan fisik dan mental yang optimal dan berkontribusi secara positif dalam lingkungan sosialnya.

8. Komunikasi

Peserta didik memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi dengan jelas serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Profil ini memungkinkan peserta didik mampu berinteraksi dengan orang lain, berbagi serta mempertahankan pendapat, menyampaikan sudut pandang yang beragam, dan aktif terlibat dalam kegiatan yang membutuhkan interaksi dua arah. Dengan demikian diharapkan lulusan yang memiliki kemampuan komunikasi dengan baik dapat membangun hubungan yang positif, menjembatani perbedaan pendapat, dan menciptakan pemahaman bersama dalam lingkungan sosial maupun profesional.

Teori Manajemen Pendidikan dalam Pengelolaan Kurikulum

Manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari manajemen pendidikan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kurikulum di tingkat lembaga. Teori seperti Total Quality Management (TQM) dan Instructional Leadership menekankan pentingnya kepemimpinan yang visioner, partisipatif, dan berbasis data dalam mengelola perubahan kurikulum.

TQM dalam pendidikan menekankan pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan melalui partisipasi semua anggota organisasi. Sementara itu, Instructional Leadership fokus

pada peran kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengembangan kurikulum, supervisi, dan evaluasi.

Pendidikan Islam: Tujuan, Nilai, dan Karakteristik Kurikulum

1. Tujuan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia seutuhnya (*insan kāmil*) yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Tujuan ini tidak hanya mencakup aspek intelektual, tetapi juga aspek spiritual dan moral, dengan harapan peserta didik dapat menjalani kehidupan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Sebagaimana dikemukakan oleh Al-Syaibani, pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi manusia secara harmonis dan seimbang, mencakup aspek jasmani, akal, dan rohani, serta mempersiapkan individu untuk kehidupan dunia dan akhirat.

2. Nilai-nilai dalam Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum pendidikan Islam mengintegrasikan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup:

1. Tauhid: Menanamkan keyakinan akan keesaan Allah sebagai dasar utama dalam kehidupan.
2. Akhlak: Mengembangkan perilaku mulia seperti jujur, amanah, sabar, dan rendah hati.
3. Ilmu: Mendorong pencarian ilmu sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Allah.
4. Amal: Mengaplikasikan ilmu dalam tindakan nyata yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Nilai-nilai ini menjadi landasan dalam setiap aspek pembelajaran, memastikan bahwa pendidikan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik.

3. Karakteristik Kurikulum Pendidikan Islam

Kurikulum pendidikan Islam memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari kurikulum umum, antara lain:

1. Holistik: Mengembangkan seluruh aspek potensi manusia secara seimbang, mencakup aspek spiritual, intelektual, emosional, dan fisik.

2. Integratif: Menggabungkan ilmu pengetahuan umum dan agama dalam satu kesatuan yang utuh, tanpa memisahkan antara keduanya.
3. Berorientasi Akhirat: Mempersiapkan peserta didik tidak hanya untuk kehidupan dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat, dengan menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.
4. Kontekstual: Menyesuaikan materi pembelajaran dengan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan peserta didik, sehingga pembelajaran menjadi relevan dan bermakna.
5. Berbasis Wahyu: Menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam pengembangan kurikulum, memastikan bahwa setiap aspek pendidikan selaras dengan ajaran Islam.

Pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia seutuhnya—insan kamil—yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Kurikulum pendidikan Islam mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dan agama, berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis, serta memperhatikan nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Karakteristiknya adalah keseimbangan antara aspek intelektual dan ruhani, teori dan praktik, serta dunia dan akhirat.

Kurikulum pendidikan Islam dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, dengan menekankan pada nilai-nilai keislaman dalam setiap aspek pembelajaran.

Tinjauan Kritis Kebijakan Kurikulum Merdeka ke Pembelajaran Mendalam

1) Latar Belakang Perubahan Kurikulum Merdeka ke Pembelajaran Mendalam

Perubahan ini didorong oleh kebutuhan peningkatan kualitas pembelajaran dan respon terhadap tantangan abad ke-21, seperti revolusi teknologi dan disrupsi sosial. Pemerintah menggeser orientasi kurikulum dari sekadar penguasaan konten menuju pembentukan kompetensi berpikir tingkat tinggi dan karakter.

Kondisi pembelajaran yang belum maksimal tersebut di atas makin berdampak terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya terjadi fenomena bersekolah tetapi tidak belajar. Beberapa kebijakan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan berfokus pada materi esensial yang mengutamakan perkembangan kompetensi peserta didik, tetapi hasilnya belum maksimal sehingga diperlukan kebijakan yang relevan, efektif, dan

mendukung pencapaian kompetensi peserta didik. Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan Indonesia belum merata di seluruh pelosok tanah air. Salah satu tantangan untuk mewujudkan pendidikan bermutu yang merata antara lain kondisi masyarakat, situasi geografis daerah, dan kesiapan pemerintah daerah yang masih sangat beragam. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur pendidikan, termasuk internet dan perangkat digital, masih menjadi tantangan utama di banyak daerah.

2) Analisis Isi Kebijakan Kurikulum Pembelajaran Mendalam

Kebijakan ini menekankan pembelajaran berbasis proyek, asesmen autentik, diferensiasi, dan penguatan peran guru sebagai fasilitator. Namun, masih terdapat celah pada aspek pelatihan guru, pendampingan implementasi, dan integrasi dengan konteks lokal.

3) Kelebihan dan Kelemahan Kebijakan Baru

Kelebihan: mendorong pembelajaran aktif, relevan, dan bermakna; memperkuat soft skills.

Kelemahan: kurangnya kesiapan sumber daya, kesenjangan antar wilayah, dan potensi bias kebijakan terhadap lembaga dengan keterbatasan fasilitas.

4) Kesiapan Lembaga Pendidikan Islam terhadap Perubahan Kurikulum

Secara umum, banyak lembaga pendidikan Islam belum memiliki kesiapan optimal, baik dari aspek pelatihan guru, infrastruktur, maupun dukungan kebijakan internal. Beberapa lembaga unggulan mulai melakukan adaptasi, namun masih terbatas jumlahnya.

5) Tantangan Implementasi di Lembaga Pendidikam

Tantangan utama meliputi minimnya pemahaman konsep *deep learning*, keterbatasan fasilitas, kurikulum ganda (nasional dan keislaman), serta resistensi terhadap perubahan yang dianggap bertentangan dengan tradisi keilmuan Islam.

Implikasi Bagi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam

1. Dampak Terhadap Perencanaan Kurikulum Di Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga perlu merevisi dokumen kurikulum agar mengakomodasi prinsip *deep learning* tanpa menghilangkan muatan keislaman. Integrasi pendekatan baru ke dalam pelajaran agama dan umum menjadi keharusan.

2. Implikasi terhadap Peran guru dan Kepala Madrasah

Guru perlu menjadi fasilitator pembelajaran, bukan sekadar penyampai materi. Kepala madrasah dituntut memiliki visi kurikulum dan kemampuan manajerial untuk mengelola perubahan secara strategis.

3. Strategi Pengembangan SDM dan Sarana Pendukung

Penguatan SDM dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, kolaborasi dengan perguruan tinggi, dan komunitas praktik. Sarana pendukung seperti ruang belajar fleksibel dan alat bantu digital perlu diprioritaskan dalam perencanaan anggaran.

4. Peran Kepemimpinan Manajerial dalam Mengelola Kurikulum Baru

Kepala lembaga harus menjadi pemimpin transformasional yang mampu menginspirasi perubahan, memotivasi guru, serta menjembatani antara kebijakan nasional dan konteks lokal pendidikan Islam.

5. Rekomendasi Penguatan Pengelolaan Kurikulum di Lembaga Pendidikan Islam

Dalam menghadapi transisi kurikulum menuju pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*), lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat sistem pengelolaan kurikulumnya agar tetap relevan, adaptif, dan konsisten dengan nilai-nilai Islam.

Berikut adalah sejumlah rekomendasi strategis:

1) Pelatihan Intensif bagi Guru dan Kepala Madrasah

Penguatan kapasitas SDM merupakan kunci keberhasilan implementasi kurikulum. Guru dan kepala madrasah perlu mengikuti pelatihan yang berkelanjutan dan terstruktur, khususnya mengenai:

1. Konsep dan prinsip pembelajaran mendalam,
2. Desain pembelajaran berbasis pemecahan masalah dan kolaborasi,
3. Integrasi nilai-nilai keislaman dalam konteks kurikulum baru.

Pelatihan dapat dilakukan melalui program diklat dari Kemenag, pelatihan daring dari Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, atau kerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI)

2) Pengembangan Kurikulum Integratif

Lembaga pendidikan Islam perlu mengembangkan kurikulum integratif yang memadukan antara:

1. Nilai-nilai keislaman,
2. Kompetensi abad 21 (4C: *critical thinking, creativity, communication, collaboration*),
3. Kompetensi dasar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Model kurikulum integratif ini telah diterapkan dalam beberapa madrasah unggulan, seperti madrasah berbasis tahfidz dan sains, yang menggabungkan sains modern dengan ilmu-ilmu keislaman

3) Dukungan Regulasi Khusus dari Kementerian Agama

Kemenag perlu merancang regulasi yang spesifik untuk mendukung adopsi kurikulum pembelajaran mendalam di madrasah dan pesantren, seperti:

1. Panduan penyusunan RPP berbasis deep learning bernuansa Islam,
2. SOP integrasi nilai spiritual dan moral dalam asesmen pembelajaran,
3. Peraturan BOS yang fleksibel untuk pembiayaan pelatihan dan sarana pembelajaran.

Regulasi ini akan memberikan kejelasan arah dan kepastian hukum bagi pengelola lembaga Islam dalam melaksanakan perubahan kurikulum

4) Kemitraan Strategis dengan Universitas dan LSM Pendidikan

Kolaborasi dengan PTKI, LPTK Islam, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dapat memperkuat:

1. Riset dan pengembangan model pembelajaran mendalam berbasis Islam,
2. Penyediaan mentor atau coach bagi guru di madrasah,

3. Proyek pembelajaran berbasis komunitas (community-based learning) di pesantren.

Kemitraan ini penting untuk mempercepat transformasi budaya akademik dan pedagogi di lingkungan lembaga pendidikan Islam

5) Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Berbasis Mutu dan Nilai Islam

Sistem monitoring dan evaluasi perlu dikembangkan untuk mengukur keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari:

1. Ketercapaian nilai spiritual peserta didik,
2. Peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran reflektif,
3. Kepuasan stakeholder pendidikan Islam (orang tua, komite madrasah, alumni).

Instrumen evaluasi harus mencerminkan paradigma mutu pendidikan Islam yang tidak hanya berbasis output (nilai ujian), tetapi juga outcome jangka panjang (karakter dan perilaku islami).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perubahan kebijakan kurikulum nasional dari Kurikulum Merdeka menuju pendekatan pembelajaran mendalam (deep learning) mencerminkan respons sistem pendidikan terhadap tantangan abad ke-21 yang menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan reflektif. Pendekatan ini berupaya untuk menekankan pentingnya pemahaman mendalam, penerapan konsep dalam konteks nyata, dan pembangunan karakter peserta didik secara holistik.

Namun, dalam konteks lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, kebijakan ini memunculkan tantangan tersendiri. Kesiapan kelembagaan, pemahaman konsep deep learning oleh guru dan pengelola, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan utama dalam implementasi kurikulum ini. Di sisi lain, pendidikan Islam memiliki filosofi, nilai, dan tujuan yang mendukung pendekatan pembelajaran mendalam, seperti integrasi antara ilmu dan iman, keseimbangan aspek intelektual dan spiritual, serta orientasi pada pembentukan insan kamil.

Melalui tinjauan kritis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa penerapan kurikulum pembelajaran mendalam di lembaga pendidikan Islam memerlukan strategi pengelolaan yang terarah dan sistemik. Penguatan kapasitas guru, penyusunan kurikulum integratif, dukungan regulasi dari Kemenag, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan implementasi. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi berbasis mutu dan nilai Islam perlu dikembangkan untuk menjamin keberlanjutan dan relevansi kurikulum dengan karakteristik pendidikan Islam.

Dengan demikian, kurikulum pembelajaran mendalam dapat diadopsi secara efektif di lembaga pendidikan Islam apabila pengelolaan yang adaptif dan kontekstual diterapkan secara konsisten, dengan tetap menjaga identitas dan nilai-nilai dasar pendidikan Islam.

Saran

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak terkait:

1. Bagi Pemerintah dan Kementerian Agama (Kemenag):

Diperlukan kebijakan afirmatif yang mendukung kesiapan madrasah dan pesantren dalam mengimplementasikan kurikulum pembelajaran mendalam. Kemenag diharapkan menyusun panduan teknis kurikulum yang berbasis nilai-nilai Islam serta memberikan dukungan regulatif dan anggaran untuk pelatihan guru, pengembangan bahan ajar, dan penyediaan sarana pendukung.

2. Bagi Lembaga Pendidikan Islam:

Madrasah dan pesantren hendaknya melakukan evaluasi internal terhadap kesiapan institusional dalam menghadapi perubahan kurikulum. Penguatan manajemen berbasis mutu, pelatihan guru secara berkelanjutan, dan pengembangan kurikulum integratif yang memadukan antara nilai-nilai keislaman dan prinsip pembelajaran mendalam perlu menjadi prioritas.

3. Bagi Guru dan Kepala Madrasah/Pesantren:

Guru sebagai ujung tombak pendidikan harus meningkatkan literasi kurikulum dan pedagogi pembelajaran mendalam. Kepala madrasah sebagai pemimpin pembelajaran perlu menciptakan budaya akademik yang reflektif, kolaboratif, dan inovatif guna mendukung implementasi kurikulum secara efektif.

4. Bagi Peneliti dan Akademisi:

Diperlukan lebih banyak kajian empiris mengenai efektivitas penerapan kurikulum pembelajaran mendalam di lembaga pendidikan Islam. Penelitian-penelitian ini penting untuk menghasilkan model implementasi yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik pendidikan Islam.

5. Bagi LSM dan Lembaga Mitra Pendidikan:

Organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan diharapkan turut ambil bagian dalam mendampingi lembaga pendidikan Islam, khususnya dalam aspek peningkatan kapasitas guru, inovasi pembelajaran, dan penguatan sistem evaluasi berbasis nilai Islam.

Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak, maka transformasi kurikulum menuju pembelajaran mendalam tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi dapat diimplementasikan secara bermakna dan berkelanjutan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Muttaqin, M. *Pendidikan Guru Madrasah Profesional di Era Revolusi Industri 4.0*. Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. 2020
- Hanafi, I. *Kurikulum Integratif Sains dan Islam di Madrasah*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan. 2021
- Hasan, A. *Reformasi Kebijakan Pendidikan Islam: Studi Kebijakan Kurikulum*. Jurnal Abjad. 2022
- Daryanto, . *Pendekatan Pembelajaran Saintifik Kurikulum 2013*. Gava Media, Jakarta.2014
- Syaifulloh, M. *Kemitraan Strategis Lembaga Pendidikan Islam dalam Era Globalisasi*. At-Tadib: Jurnal Pendidikan Islam. 2019
- Abdullah, R. *Evaluasi Kurikulum Pendidikan Islam Berbasis Karakter*. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam. 2023
- M. Bakri. "Falsafah Kurikulum dalam Pendidikan Islam." ResearchGate. 2012.
- Nisrokha. "Konsep Kurikulum Pendidikan Islam (Studi Komparatif Pemikiran Al-Ghozali dan Ibnu Miskawaih)." *Jurnal Madaniyah*, Vol. 1, Edisi XII, Januari 2017.
- Faiq Ilham Rosyadi & Usman. "Konsep Dasar Kurikulum Pendidikan Islam: Kajian Teoritis Filosofis." *Heutagogia: Journal of Islamic Education*, Vol. 1, No. 2, Desember 2021

Suyanto, dkk. “*Nasmik: Pembelajaran Mendalam, menuju Pendidikan bermutu untuk Semua*”. Kemendikdasmen. 2025.

Rahayu, Yulia. “*Problematika Kurikulum Di Sekolah Dasar*”. Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. Vol. 08 Nomor 01, Juni 2023